

Bukhori Yusuf: Dewas BPKH Terpilih Harus Jaga Sustainability Keuangan Haji

Updates. - PUBLIKKALTIM.ID

Aug 30, 2022 - 16:51



Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf

JAKARTA - Komisi VIII DPR RI telah menetapkan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan [Haji](#) (BPKH) periode tahun 2022-2027 pada Selasa (30/8/2022). Lima calon yang terpilih yakni Deni Suardini, Heru Muara Sidik, M. Dawud Arif Khan, Mulyadi, dan Rojikin. Anggota Komisi VIII DPR RI [Bukhori Yusuf](#) mengatakan, Komisi VIII DPR RI berharap Dewan Pengawas BPKH

periode 2022-2027 dapat menjaga sustainabilitas keuangan [haji](#).

“Salah satu problematika keuangan haji adalah soal menjaga kesinambungannya di tengah semakin melebarnya kesenjangan antara dana setoran [haji](#) (Bipih) dengan biaya riil [haji](#). Sebagaimana diketahui, distribusi nilai manfaat (dikenal dengan istilah: subsidi) per jemaah pada penyelenggaraan [haji](#) tahun 2022 saja sudah mencapai 59,5 persen dari biaya sebenarnya,” ungkap Bukhori dalam keterangan persnya, Selasa (30/8/2022).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ([PKS](#)) itu mengungkapkan, berdasarkan sumber yang ia peroleh, bila mengacu pada skenario [haji](#) saat ini, keuangan [haji](#) diperkirakan tidak lagi sustain mulai tahun 2023 (jika mengacu pada pendekatan finance) atau tahun 2026 (jika dihitung dengan pendekatan cashflow).

“Sejak akhir tahun 2021, saya sudah menyinggung soal kekhawatiran ini sehingga saya mendorong perlu segera dilakukannya rasionalisasi biaya setoran [haji](#). Selain itu, yang perlu diperhatikan juga adalah tentang keberanian BPKH untuk melakukan investasi langsung,” lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) [Jawa Tengah](#) I ini.

Dewan Pengawas, dalam hal ini, lanjut Bukhori, secara kewenangan memang tidak melakukan investasi, namun mereka punya kewenangan untuk mendorong dan menyetujui Badan Pelaksana BPKH untuk melakukan investasi langsung pada tempat-tempat strategis yang memiliki peluang besar memperoleh imbal hasil (return) yang tinggi, namun prudent.

Ia menekankan, anggota Dewas terpilih harus mampu mendorong reformasi investasi yang progresif terhadap Badan Pelaksana BPKH. Mereka harus memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap setiap peluang investasi yang bisa meningkatkan return, bahkan jika perlu hingga dua digit. “Sebab return saat ini baru menyentuh angka 6,5 persen per tahun. Salah satu solusi untuk memecahkan problematika keuangan [haji](#) adalah Dewas harus mampu mendorong pengelolaan keuangan [haji](#) yang High Return but Low Risk,” ujar Bukhori.

Sementara, menyikapi hasil dari kelima nama calon Anggota Dewas yang terpilih dari sepuluh kandidat yang diusulkan oleh Presiden, Bukhori mengatakan kelima nama tersebut adalah yang terbaik. Berdasarkan hasil penilaian Komisi VIII DPR RI, mereka dianggap telah memenuhi kualifikasi dari aspek integritas, memahami permasalahan BPKH, serta dinilai mampu menjalankan tugas di Dewas BPKH.

“Kepada anggota Dewas terpilih, kami berharap mereka bisa menjaga dan mendorong proses pengembangan dan pengelolaan dana [haji](#) yang besar, sehingga BPKH mampu memperoleh return yang memadai untuk mengantisipasi dinamika [haji](#) yang berkembang setiap tahunnya, khususnya terkait peningkatan biaya [haji](#). Selain itu, BPKH ke depan diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dengan Komisi VIII,” pungkasnya. (rnm/sf)